

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul Penyelesaian Permasalahan Sertifikat Hak Milik Ganda Di Kantor Pertanahan Kota Semarang, skripsi membahas mengenai kasus dimana untuk sebidang tanah diterbitkan lebih dari satu sertifikat yang letak tanahnya saling tumpang tindih seluruhnya atau hanya sebagian. Kasus semacam ini diterbitkan sebagai kasus sertifikat ganda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian permasalahan sertifikat hak milik ganda di Kantor Pertanahan Kota Semarang, untuk mengetahui hambatan serta solusi pada saat penyelesaian permasalahan sertifikat hak milik ganda di Kantor Pertanahan Kota Semarang.

Metode penelitian menggunakan pendekatan *yuridis sosiologis*. Sumber data diperoleh dari beberapa tahapan yaitu melalui penelitian lapangan (wawancara) dan penelitian pustaka. analisis data dengan cara sistematis penyajian Data serta penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Dalam hal penyelesaian kasus sertipikat ganda terdapat dua cara penyelesaian yaitu melalui proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Semarang dimana Kementrian Agraria dan Tata Ruang Kantor Pertanahan Kota Semarang memanggil kedua belah pihak untuk menyelesaikan kasusnya dan mencari solusi, namun apabila tidak terdapat jalan keluar melalui proses mediasi maka di lakukan penyelesaian melalui proses litigasi atau penyelesaian kasus di pengadilan. Pada saat penyelesaian permasalahan sertifikat hak milik ganda di Kantor Pertanahan Kota Semarang, memiliki 2 (dua) hambatan yaitu , faktor internal, antara lain tidak lengkapnya data-data yang ada terutama pada dokumen peta. Selanjutnya faktor eksternal, yaitu adanya pihak yang tidak datang ketika akan dimediasi yang akhir menunda mediasi ataupun ada pihak yang memakai alamat palsu, yang pada akhirnya pada saat pemanggilan para pihak menjadi terhambat. Ketika akan dimediasi oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang akan tetapi pihak yang bersengketa tersebut tidak hadir setelah diundang 3 (tiga) kali atau salah satu pihak menolak untuk dilakukan mediasi, maka mediasi tersebut batal dan para pihak oleh Kantor Pertanahan Kota Semarang merekomendasikan berlanjut ke jalur hukum. Solusi dalam menghadapi hambatan pada saat penyelesaian permasalahan sertifikat hak milik ganda di Kantor Pertanahan Kota Semarang kendala diatas yaitu mengumpulkan data-data objek tanah yang menjadi persengketaan dan mencari informasi mengenai tanah dan menanamkan ittikad baik untuk para pihak yang bersengketa agar tidak terjadi penundaan mediasi.

Kata Kunci : Penyelesaian,Ganda, Sertifikat Hak Milik

ABSTRACT

This research entitled Problem Solving of Multiple Ownership Certificates at the Semarang City Land Office, this thesis discusses cases where more than one land plot is issued with more than one certificate where the land overlaps entirely or only partially. Such cases are issued as dual certificate cases. This study aims to determine the resolution of the problem of double ownership certificates in the Semarang City Land Office, to find out the problems and solutions when solving the problems of double ownership certificates in the Semarang City Land Office.

The research method used a sociological juridical approach. Sources of data were obtained from several stages, namely through field research (interviews) and literature research. data analysis in a systematic way, data presentation and drawing conclusions.

The results of this study indicate that: In terms of solving double certificate cases, there are two ways of resolution, namely through the mediation process at the Semarang City Land Office where the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning of the Semarang City Land Office calls both parties to solve the case and find a solution or win- win solution, but if there is no way out through the mediation process, the settlement will be done through the litigation process or the settlement of cases in court. Obstacles during the resolution of the issue of double ownership certificates at the Semarang City Land Office have 2 (two) problems, namely, internal factors, including incomplete data, especially on map documents. Furthermore, external factors, namely there are parties who do not come when the mediation is going to end up delaying the mediation or there are parties who use a fake address, which in the end when the summoning of the parties becomes blocked. When it is to be mediated by the Semarang City Land Office but the disputing parties do not attend after being invited 3 (three) times or one of the parties refuses to conduct mediation, the mediation is canceled and the parties by the Semarang City Land Office recommend proceeding to legal channels. The solution to dealing with obstacles when resolving the problem of multiple ownership certificates at the Semarang City Land Office is the collection of data on land objects in dispute and seeking information about land and instilling good faith for the parties in dispute so that there is no delay in mediation.

Keywords: Settlement, Double, Freehold Certificate